



## Pemberdayaan Perempuan dalam Manajemen Kota: Mendukung Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perkotaan

<sup>1)</sup>Angeliq Nicole L Tobing, <sup>2)</sup>Ratu Aisyah Diva Maha, <sup>3)</sup>Nayma Kusuma Fadhillah,

<sup>4)</sup>Yeto Anom Rahmadana

<sup>1), 2), 3), 4)</sup>Program Studi Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta

Email: [nanafadz20@gmail.com](mailto:nanafadz20@gmail.com)

### Abstract

The main problem that needs to be researched is gender inequality in city management which hinders women's participation in urban decision making. This research aims to analyze the impact of gender inequality on women's participation in urban decision making in Indonesia. The research method used is qualitative, with a focus on identifying structural, normative and gender stereotype barriers that limit women's access to key policy positions. The research findings highlight the need for women's empowerment through leadership training, implementation of women's representation quotas, and gender awareness campaigns as strategies to address inequality. The results of this research confirm that women's empowerment not only acts as a strategic solution, but also creates a solid foundation for increasing inclusiveness in city management. Therefore, concrete steps such as training and women's representation quotas can work together to overcome these obstacles, paving the way for greater women's participation in urban decision-making. Therefore, concrete steps such as training and women's representation quotas can work together to overcome these obstacles, paving the way for greater women's participation in urban decision-making. This research makes a significant contribution to the development of policy science by offering an in-depth understanding of the complexity of gender inequality and providing insight into strategic solutions that can be implemented in the context of city management in Indonesia.

**Keywords:** Women's Empowerment, City Management, Women's Participation, Urban Decision Making

### Abstrak

Masalah utama yang perlu diteliti adalah ketidaksetaraan gender dalam manajemen kota yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidaksetaraan gender terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada identifikasi hambatan struktural, normatif, dan stereotip gender yang membatasi akses perempuan ke posisi kebijakan kunci. Temuan penelitian menyoroti perlunya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, implementasi kuota keterwakilan perempuan, dan kampanye kesadaran gender sebagai strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berperan sebagai solusi strategis, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk peningkatan inklusivitas dalam manajemen kota. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret seperti pelatihan dan kuota keterwakilan perempuan dapat bersinergi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, membuka jalan bagi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam pembuatan keputusan perkotaan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu kebijakan dengan menawarkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas ketidaksetaraan gender dan memberikan pandangan terhadap solusi strategis yang dapat diimplementasikan dalam konteks manajemen kota di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Manajemen Kota, Partisipasi Perempuan, Pengambilan Keputusan Perkotaan

## PENDAHULUAN

Pentingnya pemberdayaan perempuan dalam manajemen kota sebagai aspek penting pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan telah menarik perhatian sebagai topik penelitian yang signifikan. Fenomena ini memiliki dampak yang luas tidak hanya pada perempuan sendiri tetapi juga pada perkembangan kota secara keseluruhan. Di Indonesia, ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan perkotaan masih menjadi kendala serius yang mempengaruhi perencanaan dan kebijakan perkotaan (Ari et al., 2022). Fenomena ketidaksetaraan gender dalam manajemen kota di Indonesia tercermin dalam akses terbatas perempuan ke posisi kebijakan dan pengaruh mereka dalam perencanaan perkotaan. Stereotip gender dan peran tradisional perempuan sering menjadi penghambat utama bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Pahlevi & Rahim, 2023). Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap layanan dasar, dan pembangunan sosial ekonomi perkotaan. Meskipun terdapat perubahan positif dalam beberapa aspek, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai partisipasi perempuan yang optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya di Indonesia telah menyoroti masalah ini. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan perkotaan memperburuk ketidaksetaraan sosial ekonomi dalam masyarakat perkotaan. Penelitian juga mengidentifikasi hambatan-hambatan khusus seperti stereotip gender dan keterbatasan akses perempuan ke posisi kebijakan. Namun, sejauh ini, belum ada konsensus yang jelas tentang solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan (Nasution & Marthalina, 2018). Keterbatasan dalam riset-riset sebelumnya mencakup ketidakjelasan tentang dampak konkret ketidaksetaraan gender terhadap perencanaan dan kebijakan perkotaan. Selain itu, ada kekurangan informasi terperinci tentang hambatan-hambatan psikologis dan sosial yang dihadapi perempuan urban dalam mengekspresikan kebutuhan mereka. Research gap ini menunjukkan perlunya fokus pada aspek-aspek yang lebih spesifik untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Untuk menutup kelemahan riset sebelumnya, kita perlu memperdalam pemahaman tentang dampak konkret ketidaksetaraan gender dalam perencanaan dan kebijakan perkotaan. Hal ini dapat dicapai dengan menganalisis secara lebih rinci distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan perkotaan yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender. Selain itu, mendalaminya aspek psikologis dan sosial dari perempuan urban dalam konteks pengambilan keputusan perkotaan dapat membuka wawasan baru untuk merancang program pemberdayaan yang lebih efektif. Dengan

memahami peran perempuan dalam manajemen kota secara holistik, kita dapat menghasilkan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu kebijakan perkotaan. Ide yang diusulkan untuk menutup kelemahan riset sebelumnya adalah mengintegrasikan pendekatan lintas sektor yang lebih luas dalam pemberdayaan perempuan. Selain melibatkan perempuan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, penting untuk memperhitungkan aspek-aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi perempuan dalam konteks perkotaan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan dapat mencakup program pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, implementasi kuota keterwakilan perempuan, kampanye kesadaran gender, serta integrasi indikator gender dalam evaluasi kebijakan perkotaan.

Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian Pemberdayaan Perempuan Dalam Manajemen Kota: Mendukung Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Perkotaan, agar dapat menciptakan dasar yang lebih kokoh bagi penelitian dan kebijakan di masa depan. Dengan memahami secara menyeluruh fenomena ketidaksetaraan gender dalam manajemen kota di Indonesia, kita dapat merumuskan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk mencapai perkotaan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam manajemen kota dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori yang Digunakan**

#### a) Teori Pemberdayaan Perempuan

Teori ini menekankan pentingnya memberdayakan perempuan melalui akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan perempuan dianggap krusial untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Alif Hudzaifah Fahri et al., 2023).

#### b) Teori Keterwakilan Politik

Fokus pada pentingnya keterwakilan perempuan dalam institusi politik dan kebijakan. Teori ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam pengambilan keputusan menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat (Alamona et al., 2017).

c) Teori Perubahan Sosial

Menggambarkan bagaimana perubahan sosial terjadi melalui perubahan norma-norma, nilai, dan struktur sosial. Dalam konteks ini, perubahan dalam peran gender dan stereotip gender dapat mengarah pada perubahan sosial yang mendukung partisipasi perempuan dalam manajemen kota (Rosyidah & Nurwati, 2019).

**Konsep-Konsep yang digunakan**

a) Ketidaksetaraan Gender

Konsep ini mencakup perbedaan perlakuan dan peluang antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks manajemen kota, ketidaksetaraan gender termanifestasi dalam akses terbatas perempuan ke posisi kebijakan dan pengaruh mereka dalam perencanaan perkotaan (Khaerani, 2017).

b) Partisipasi Perempuan

Mengacu pada keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam manajemen kota, partisipasi perempuan penting untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan dan kebijakan perkotaan (Monica & Fauziah, 2017).

c) Stereotip Gender

Konsep ini mencakup pandangan dan harapan tradisional terhadap peran laki-laki dan perempuan. Stereotip gender dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan karena dianggap tidak sesuai dengan peran tradisional mereka (Afni et al., 2022).

d) Pemberdayaan Perempuan

Melibatkan pemberian kekuasaan, peningkatan keterampilan, dan perubahan struktural untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan menjadi solusi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam manajemen kota (Nur, 2019).

**Peran Organisasi Perempuan dalam Ruang Perkotaan (Putra & Yulindrasari, 2023)**

Penelitian ini mengeksplorasi peran kepemimpinan perempuan dalam penciptaan ruang komunal di kampung kota di Jakarta Selatan, Indonesia. Saat ini, tekanan pembangunan perkotaan yang pesat telah menyebabkan penyusutan kuantitas dan luasan ruang publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dampak pemimpin perempuan dalam menghadapi tantangan pembangunan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di kampung kota Jakarta Selatan memberikan perhatian khusus pada isu-isu kesehatan,

lingkungan, dan akses ruang publik bagi warga yang termarjinalkan. Keberhasilan penciptaan ruang publik ini sangat tergantung pada dukungan komunitas yang solid dan kolegialitas warga. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dan kolaborasi komunitas dalam menjaga inklusivitas, keadilan, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan di tengah tekanan pembangunan yang terus berlanjut.

### **Kajian Partisipasi Perempuan Pada Perekonomian Keluarga Di Kampung Pelangi Randusari (Tisnandya et al., 2021)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi perempuan dalam perekonomian keluarga di Kampung Pelangi Randusari melalui pelatihan keterampilan dan pembentukan usaha mikro. Metode kuantitatif digunakan dengan alat analisis skoring dan pembobotan, dan data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terhadap 30 pasangan suami istri. Hasil menunjukkan partisipasi perempuan dominan dalam tenaga, uang, dan harta benda, dengan faktor penentu utama adalah kemampuan memanfaatkan pelatihan dan mengelola usaha mikro. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan dukungan pada usaha mikro dapat signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Studi ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan program pemberdayaan perempuan dan pembentukan usaha mikro di lingkungan kampung seperti Kampung Pelangi Randusari.

### **Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan) (Amrizal et al., 2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Menggunakan teori teknik Longwe sebagai alat analisis, penelitian ini mengeksplorasi lima dimensi kriteria analisis, yaitu dimensi kesejahteraan, akses, penyadaran, partisipasi aktif, dan penguasaan/control. Melalui metode studi kasus di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam PNPM-MP telah terimplementasikan dalam siklus kegiatan pemberdayaan. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi partisipasi perempuan. Meskipun ada hambatan, partisipasi perempuan dalam pembangunan di PNPM-MP terlihat aktif, menjadikan mereka subyek pembangunan. Implikasi dari partisipasi perempuan dalam program ini menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. Sebagai kesimpulan, penelitian

ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika partisipasi perempuan dalam PNPM-MP, serta faktor-faktor yang memengaruhi dan implikasinya terhadap peningkatan kapabilitas perempuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan fokus pada beberapa kota besar di Indonesia untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan. Pemilihan kota akan didasarkan pada pertimbangan variasi tingkat pembangunan, ukuran populasi, dan kondisi sosial ekonomi. Dengan melibatkan kota-kota dengan karakteristik yang beragam. Penelitian ini akan mengadopsi paradigma konstruktivis, mengakui konstruksisosial dari realitas dan pentingnya memahami perspektif dan pengalaman unik partisipan dalam konteks pengambilan keputusan perkotaan. Partisipan akan dipilih dengan metode purposive sampling, dengan kriteria inklusi melibatkan perempuan yang memiliki pengalaman atau kepentingan dalam pengambilan keputusan perkotaan, termasuk anggota dewan kota, pejabat pemerintah, dan aktivis masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam akan digunakan untuk mendapatkan pandangan mendalam dan kontekstual dari partisipan. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika dan interaksi dalam pengambilan keputusan perkotaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Langkah-langkah analisis melibatkan pengkodean terbuka, pembentukan kategori, dan pengembangan tema utama. Analisis akan dilakukan secara iteratif untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Ketidaksetaraan Gender Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perkotaan

Penelitian ini menyoroti pengaruh signifikan dari ketidaksetaraan gender terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, meskipun kemajuan telah dicapai, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan normatif yang membatasi akses mereka ke posisi kebijakan kunci. Teori pemberdayaan perempuan menjadi dasar analisis untuk menjelaskan kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengambil peran aktif dalam manajemen kota.

Dalam konteks pengambilan keputusan perkotaan, perempuan menghadapi hambatan struktural yang signifikan (Alamona et al., 2017). Meskipun ada kemajuan dalam peningkatan jumlah perempuan dalam dewan kota, akses mereka ke posisi

kebijakan kunci masih terbatas. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan, kurangnya dukungan finansial, dan minimnya peluang pelatihan kepemimpinan khusus perempuan menjadi hambatan nyata (Lingga Astiti, 2019).

Teori pemberdayaan perempuan membantu menjelaskan bahwa untuk mencapai partisipasi yang merata, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural ini melalui pendekatan pemberdayaan dan pembangunan keterampilan.

a) Norma dan Stereotip Gender sebagai Penghambat Utama

Stereotip gender dan harapan terhadap peran tradisional perempuan dalam masyarakat masih menjadi penghambat utama bagi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan perkotaan (Hidayah & Hamidah, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai figur yang lebih cocok untuk peran domestik daripada peran kebijakan dapat membatasi aspirasi dan keterlibatan perempuan. Melalui lensa teori pemberdayaan perempuan, penting untuk mengubah norma dan stereotip gender yang melekat dalam budaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam manajemen kota.

b) Peran Tradisional Perempuan sebagai Penghalang

Teori pemberdayaan perempuan menggariskan bahwa peran tradisional perempuan yang terkotak-kotak dalam ranah domestik juga membatasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan perkotaan. Pandangan masyarakat yang mengaitkan perempuan dengan tanggung jawab domestik dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan pengakuan terhadap peran mereka dalam kebijakan perkotaan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan perempuan harus mencakup transformasi norma-norma sosial dan peran tradisional untuk memastikan perempuan dapat memberikan kontribusi secara maksimal dalam pengambilan keputusan perkotaan (Manembu, 2017).

Hasil penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap perumusan kebijakan dan tindakan lanjutan. Rekomendasi termasuk pengembangan program pelatihan kepemimpinan khusus perempuan untuk mengatasi hambatan keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan afirmatif, seperti implementasi kuota keterwakilan perempuan, untuk memastikan perempuan mendapatkan posisi kunci dalam pengambilan keputusan perkotaan. Dalam konteks norma dan stereotip gender, kampanye kesadaran gender perlu diluncurkan untuk merubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam manajemen kota.

Pendidikan masyarakat tentang kepentingan dan keunikan kontribusi perempuan dalam kebijakan perkotaan juga menjadi kunci untuk mengubah paradigma dan menciptakandukungan yang lebih luas.

### **Peran Penting Keterwakilan Perempuan dalam Konteks Kebijakan Perkotaan**

Dalam melihat peran penting keterwakilan perempuan dalam konteks kebijakan perkotaan, teori keterwakilan politik menjadi pijakan utama yang memandu pemahaman dan analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam dewan kota dan posisi kebijakan kunci memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ketepatan dan keadilan dalam merumuskan kebijakan perkotaan. Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, terutama dalam konteks perkotaan, dianggap sebagai elemen penting untuk mencapai kebijakan yang lebih holistik dan inklusif (Maramis & Londa, 2020). Hasil penelitian mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kebijakan membawa suara yang unik dan perspektif yang dapat memperkaya proses pembuatan kebijakan perkotaan.

Kontribusi Keterwakilan Perempuan Terhadap Ketepatan Kebijakan Keterwakilan perempuan di dewan kota dan posisi kebijakan utama membuka jalan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mewakili keberagaman masyarakat. Suara perempuan, yang sering kali mencerminkan pengalaman hidup, kebutuhan, dan aspirasi yang berbeda, menjadi faktor penting dalam merancang kebijakan yang mencakup semua lapisan masyarakat perkotaan. Ketepatan kebijakan perkotaan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menanggapi dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi beragam masyarakat perkotaan. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki wawasan yang lebih baik terhadap isu-isu spesifik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dengan adanya keterwakilan perempuan yang cukup, kebijakan perkotaan dapat lebih memahami dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, meminimalkan risiko kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### a) Peningkatan Keadilan dalam Distribusi Sumber Daya

Selain itu, keterwakilan perempuan berkontribusi pada peningkatan keadilan dalam distribusi sumber daya perkotaan. Dalam konteks ini, sumber daya mencakup alokasi anggaran, infrastruktur, dan layanan publik. Perempuan, sebagai bagian integral dari masyarakat perkotaan, memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan lokal dan distribusi sumber daya yang adil. Dengan peran aktif dalam pengambilan keputusan, perempuan dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan merata, memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Keterwakilan perempuan juga dapat mengurangi disparitas gender dalam distribusi sumber daya. Melalui partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, aspek-aspek seperti pendidikan dan kesehatan perempuan dapat mendapatkan perhatian yang lebih baik dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan gender yang mengakui hak-hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.

b) Suara Unik dan Perspektif yang Diperlukan

Perempuan membawa suara yang unik dan perspektif yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman perspektif ini membantu merancang kebijakan yang lebih holistik, memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan beragam kelompok masyarakat. Selain itu, keterwakilan perempuan dapat menghasilkan inovasi kebijakan, membuka peluang untuk solusi yang lebih kreatif dan inklusif. Dalam menanggapi isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketidaksetaraansosial, suara perempuan dapat menjadi kunci untuk memahami dampak yang berbeda pada berbagai segmen masyarakat. Keberagaman ini menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melibatkan perempuan secara lebih baik tetapi juga memperhitungkan kebutuhan berbagai kelompok, menciptakan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif(Pradipta, 2018).

### **Dampak Stereotip Gender dan Peran Tradisional Terhadap Partisipasi Perempuan**

Analisis mendalam terhadap dampak stereotip gender dan peran tradisional terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan mengungkapkan dinamika kompleks yang merugikan dan menghambat kemajuan kesetaraan gender. Stereotip gender, sebagai konsep yang memahami harapan dan pandangan tradisional terhadap peran laki-laki dan perempuan, memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks manajemen kota.

Pertama-tama, stereotip gender mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kapabilitas dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Terdapat prasangka tersembunyi bahwa perempuan cenderung kurang mampu atau kurang kompeten dalam mengelola aspek-aspek kompleks dalam manajemen kota. Akibatnya, mereka sering kali diabaikan atau dianggap tidak memiliki kontribusi yang berarti dalam pengambilan keputusan perkotaan. Dampak selanjutnya adalah pembatasan perempuan dalam mengekspresikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Stereotip gender menciptakan norma-norma sosial yang mengarah pada ekspektasi tertentu terhadap perilaku perempuan. Dalam konteks pengambilan keputusan perkotaan, ini dapat menghasilkan lingkungan di mana perempuan merasa tidak

nyaman atau tidak diakui untuk berbicaraterbuka. Pemikiran bahwa perempuan lebih sesuai dengan peran domestik dan kurang relevan dalam ranah kebijakan dapat menyebabkan penolakan atau pengabaian terhadap suara mereka (Taufik et al., 2022).

Peran tradisional perempuan sebagai pengasuh dan pelindung keluarga juga memainkan peran signifikan dalam pembatasan partisipasi perempuan. Pandangan ini menciptakan ekspektasi bahwa kepentingan perempuan lebih bersifat pribadi dan keluarga daripada bersifat publik (Rahim Abdul, 2016). Dalam konteks manajemen kota, ini mengarah pada pandangan sempit tentang isu-isu yang dianggap relevan ataupenting bagi perempuan. Sebagai contoh, isu-isu seperti perawatan anak dan kesejahteraan keluarga mungkin dianggap kurang signifikan dalam kebijakan perkotaan. Penting untuk mencatat bahwa dampak stereotip gender tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga bersifat struktural dan institusional. Stereotip ini dapat tercermin dalam proses rekrutmen dan seleksi untuk posisi kebijakan kunci, mengakibatkan akses terbatas perempuan ke dalam lingkaran pengambilan keputusan perkotaan. Selain itu, peran tradisional perempuan menciptakan norma dan aturan yang membatasi ruang gerak perempuan dalam mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk memperluas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan, pemahaman mendalam dan penghapusan stereotip gender menjadi langkah kunci. Edukasi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang konsekuensi negatif stereotip gender akan membantu mengubah persepsi dan memecah hambatan psikologis. Pada tingkat institusional, langkah-langkah afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan dalam dewan kota dan posisi kebijakan dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan struktural. Penting juga untuk menggeser paradigma yang membatasi peran perempuan dalam kebijakan perkotaan. Mendorong perubahan dalam penilaian terhadap kepentingan perempuan yang melibatkan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pekerjaan dapat membantu memperluas cakupan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat perkotaan secara menyeluruh.

### **Pemberdayaan Perempuan sebagai Solusi Strategis**

Dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan perkotaan, teori pemberdayaan perempuan menjadi pilar utama sebagai solusi strategis. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas upaya pemberdayaan perempuan sebagai langkah kritis untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan di ranah perkotaan (Emi Dewi Susanti et al., 2023).

Pertama-tama, pelatihan kepemimpinan khusus perempuan telah terbukti sebagai sarana efektif untuk mengatasi kendala yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kebijakan kunci. Dalam melibatkan perempuan dalam pelatihan ini, keterampilan kepemimpinan, komunikasi efektif, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu perkotaan diperkuat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualifikasi perempuan untuk posisi kebijakan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berperan aktif dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan perkotaan.

Implementasi kuota keterwakilan perempuan dalam dewan kota dan posisi kebijakan menjadi langkah konkret untuk memastikan perwakilan yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan. Kuota ini memberikan jaminan bahwa setidaknya sebagian posisi kebijakan akan diisi oleh perempuan, meresapi perspektif dan kepentingan mereka ke dalam keputusan perkotaan. Ini juga membantu mengatasi ketidaksetaraan struktural yang terjadi dalam akses perempuan ke lingkaran pengambilan keputusan, menciptakan platform yang lebih merata.

Selain itu, kampanye kesadaran gender memainkan peran penting dalam merubah pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peran perempuan dalam manajemen kota. Kampanye ini membantu menggugah kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan perkotaan, mengajak masyarakat untuk mendukung partisipasi aktif perempuan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai dan kontribusi perempuan dalam pembangunan perkotaan, kampanye kesadaran gender menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong partisipasi perempuan.

Penting untuk mencatat bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga substantif. Pemberdayaan substansial melibatkan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, pelatihan, dan akses keposisi kebijakan. Dengan memberikan perempuan akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, pemberdayaan perempuan menciptakan landasan yang kokoh untuk peningkatan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan perkotaan (Suhardi, 2019).

Secara kolektif, pelatihan kepemimpinan, implementasi kuota keterwakilan perempuan, dan kampanye kesadaran gender menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan. Pendekatan ini mengakui kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan dan menyediakan solusi yang komprehensif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam manajemen kota. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi solusi strategis yang tidak hanya merubah landscape pengambilan keputusan perkotaan tetapi juga menciptakan perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan dampak signifikan ketidaksetaraan gender terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan perkotaan di Indonesia. Hambatan struktural, normatif, dan stereotip gender membatasi akses perempuan ke posisi kebijakan kunci. Teori pemberdayaan perempuan menyoroti perlunya mengatasi kendala ini melalui pelatihan kepemimpinan, kuota keterwakilan perempuan, dan kampanye kesadaran gender. Kesimpulannya, pemberdayaan perempuan merupakan solusi strategis untuk menciptakan manajemen kota yang lebih inklusif. Langkah-langkah konkret, seperti pelatihan dan kuota, bersinergi dalam mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan dasar yang kokoh untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Rezal, M., & Latoki, L. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(1), 19–48. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.980>
- Alamona, J., Zakarias, J. D., & Kawung, E. J. R. (2017). Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan DiLembaga Legislatif Kota Manado). *Holistik*, X(20), 1–19.
- Alif Hudzaifah Fahri, M., Junaeda, S., & Nur, F. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Wanita Dengan Responsif Gender : Studi Kasus Kelurahan Pattingalloang. *JSI Jurnal Socia Logica*, 3(2), 3.
- Amrizal, M., Amrizal, M. H., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2016). Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan). *Pamator Journal*, 9(2), 95–102. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3373>
- Ari, I. R. D., Waloejo, B. S., & Hariyani, S. (2022). Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(1), 23–35. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>
- Emi Dewi Susanti, Siagian, N., & Siregar, H. (2023). Pemberdayaan DanKesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di KabupatenNias Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 107–123. <https://doi.org/10.51622/jispol.v3i1.1345>

Hidayah, N., & Hamidah. (2022). Stereotip gender dan akuntan wanita. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(12), 1524–1537.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>

Khaerani, S. N. (2017). Kesetaraan dan ketidakadilan gender dalam bidang ekonomi pada masyarakat tradisional sasak di desa bayan kecamatan bayan kabupaten lombok utara. *Qawwam*, 11(1), 59–76.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/723>

Lingga Astiti. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit Di SKB Trenggalek. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 1–9.

Manembu, A. E. (2017). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–28.

Maramis, R. U., & Londa, F. D. J. L. V. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Representatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(90).

Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 217–228.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1314>

Nasution, I. M. N., & Marthalina. (2018). Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender. *JE & KP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 145–162.

Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *An-Nisa*, 10(1), 99–111.  
<https://doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388>

Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 259–268.  
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766>

Pradipta, H. R. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan berdasarkan Fungsi DPRD di Kota Semarang Periode 2014-2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 171–180.

Putra, B. D., & Yulindrasari, H. (2023). Peran Organisasi Perempuan dalam Ruang Perkotaan. *Jurnal Penataan Ruang*, 18(1), 7–13.  
<https://doi.org/10.12962/j2716179x.v18i1.12857>

Rahim Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 268–269.

Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 10.  
<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>

Suhardi, A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup-Perempuan (PKH-P).

*AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1), 67–81.

Taufik, M., Hasnani, & Suhartina. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 50–65.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tisnandy, M., Esariti, L., & Sophianingrum, M. (2021). Kajian Partisipasi Perempuan Pada Perekonomian Keluarga Di Kampung Pelangi Randusari. *Jurnal Planologi*, 18(2), 164. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.13345>